

# **KEDUDUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA**

**Oleh : Isnaini Nur Zubaidah**  
**Program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang**  
**Jl. MT Haryono 193 Malang**  
**Email : isnaininurzubaidah@gmail.com**

## **Abstrak**

Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu alat bukti dan barang bukti, undang - undang telah mengatur hal ini, seperti dalam hal tindak pidana narkoba. Dalam mendapatkan barang bukti, penyidik juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyidik Polsek Singosari dalam melakukan penyitaan barang bukti cenderung menggunakan teknik penyitaan dalam keadaan mendesak, karena sifat barang bukti tindak pidana narkoba yang mudah dimusnahkan atau disembunyikan oleh tersangka. Barang bukti tindak pidana narkoba yang disita oleh penyidik juga efektif pada tahapan pembuktian.

Kata Kunci : penyitaan, barang bukti, tindak pidana narkoba.

## **Abstract**

*The evidence of the accused or the suspect is guilty or not depends on the evidence that has been used to commit a felony or misdemeanor. To protect and ensure the integrity of the evidence the law had arranged this, as in the case of narcotic crime. In obtaining evidence, the investigator must also consider the applicable procedures so that no arbitrariness by the investigator to conduct seizure of evidence. This research uses empirical juridical approach using interview techniques in collecting the data. This research is included in the description research. Based on the results of research and discussion that has been done can be concluded that the Singosari Police investigators in performing seizure of evidence tend to use foreclosures techniques in urgent circumstances, because of the characteristic of the crime of drug evidence that easily destroyed or hidden by the suspect. Evidence seized narcotic crime Departement investigators also proving effective at this stage.*

*Keywords : implementation seizure, evidenced, narcotic crime.*

## **PENDAHULUAN**

Pembuktian atas suatu kebenaran yang berkaitan dengan pergaulan hidup bermasyarakat, akan menghasilkan cara pembuktian yang sederhana, tidak terlalu formal dan malah kadang diserahkan kepada orang-orang. Sedangkan apabila pembuktian yang berhubungan antara orang dengan pemerintah atau dengan negara atau dikenal sebagai hubungan publik, kaidah pembuktiannya formal dan bersifat mengikat ketentuan tentang kaidah dan cara pembuktian tindak pidana bersifat mengikat dan

senantiasa mempedomani aturan atau kaidah pembuktian yang terjelma dalam hukum pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, didasarkan pada alat bukti yang telah di atur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa;

Pelaksanaan mengenai hukum acara, KUHAP mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir 16 dinyatakan : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.” Dalam prapenelitian diperoleh data bahwa dalam melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda- benda sitaan negara.

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif.. Penelitian normatif karena data yang diperoleh dari bahan pustaka dan dilakukan pencarian data lapangan dalam menjawab rumusan masalah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Penyitaan Barang Bukti Sebagai Hasil Kejahatan Narkoba**

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntutan oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan

Pembuktian dalam suatu persidangan, barang bukti merupakan hal yang penting dalam proses tersebut. Dalam hal ini barang bukti berguna untuk menumbuhkan keyakinan suatu hakim dalam menyakini bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut. Fungsi barang bukti dalam proses pidana sendiri bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari hal tersebut bisa kita lihat dasar dari fungsi barang bukti di dalam Pasal 183 KUHAP, yang dimana dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. adanya ketentuan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukan bahwa negara kita menganut system atau teori pembuktian secara negative menurut undang-undang (negative wettelijk).

Dalam hal ini, telah jelas bahwa barang bukti memang penting dalam persidangan dikarenakan terdapat keyakinan hakim dalam melihat barang bukti. Barang bukti memang sangat penting, sesuai yang telah di jelaskan oleh R. Subekti dalam bukunya Hendar :

*'..., biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang di tetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.'*

Teori pembuktian ini, telah diterima oleh para ahli hukum dalam penerapannya. Namun para ahli masih memikirkan untuk memberi batasan terhadap keyakinan hakim, sehingga keyakinan hakim dapat terukur.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah *"upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum (wederechtrlyk). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya."*

Objek utama tindak pidana narkoba yang sangat mudah untuk dihilangkan, disembunyikan bahkan dimusnahkan oleh tersangka, maka penyidik Polsek Singosari cenderung menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak. Berikut ini adalah langkah-langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Singosari dalam menyita barang bukti tindak pidana narkoba:

1. Dilakukan Dengan Surat Perintah Penyitaan Dari Kepala Kepolisian Sektor Singosari. Kepala Kepolisian Sektor Singosari memberikan surat perintah penyitaan kepada penyidik dan atau penyidik pembantu yang akan melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba. Sehingga hanya penyidik dan atau penyidik pembantu yang menerima surat perintah yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkoba. Isi dari surat perintah penyitaan tersebut tentunya perintah untuk menyita benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, melakukan pembungkusan ataupun penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita, dan segera mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang bukti yang disita oleh penyidik dan atau penyidik pembantu yang diperintahkan dan di tandatangani oleh tersangka dan saksi - saksi.
2. Segera membuat berita acara penyitaan. Setelah melakukan penyitaan yang didasari adanya surat perintah pelaksanaan penyitaan barang bukti, penyidik wajib membuat

berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan tersebut akan dibacakan dan ditandatangani oleh orang dimana barang yang disita tersebut berasal yang disaksikan oleh dua orang saksi. Berita acara penyitaan ini bertujuan sebagai bukti, bahwa penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkotika telah melakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang ada. Karena orang darimana benda yang disita tersebut dapat menolak menandatangani jika merasa penyidik melakukan perbuatan yang dianggap tidak sesuai peraturan yang ada. Namun jika pemilik atau orang yang menguasai barang bukti tersebut menandatangani, hal itu menunjukkan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan penyidik sudah benar dan sesuai.

3. Melakukan penimbangan barang bukti. Barang bukti tindak pidana narkotika yang telah disita oleh penyidik, kemudian ditimbang untuk diketahui berapa beratnya. Hal ini juga sangat penting perannya dalam tahapan penyidikan dan pembuktian. Apakah tersangka hanyalah pemakai, pengedar ataupun bandar narkoba.
4. Membuat berita acara penimbangan barang bukti. Seperti halnya dengan proses lainnya dalam tahap penyidikan, penimbangan barang bukti juga harus dibuat berita acara. Berita acara ini di saksikan oleh tersangka dan juga saksi-saksi yang menyaksikan acara penimbangan barang bukti ini. Dalam berita acara penimbangan ini, dijelaskan tentang benda apa yang ditimbang dan juga berapa berat hasil timbangan tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana tata cara yang dilakukan pada saat proses penimbangan barang bukti. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penimbangan barang bukti. Apabila tersangka sudah setuju dan puas dengan hasil dari penimbangan barang bukti tersebut, maka tersangka harus menanda tangani berita acara penimbangan barang bukti. Namun jika tersangka merasa terdapat kesalahan dan tidak puas atas proses penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka berhak untuk tidak menandatangani berita acara penimbangan barang bukti yang telah dibuat.
5. Penyidik mengajukan test kit pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik (labfor) Cabang Surabaya di Surabaya guna keperluan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jatim.
6. Membuat berita acara penyisihan barang bukti dan berita acara pengambilan darah dan urine untuk keperluan pemeriksaaan di Laboratorium Forensik Polda Jatim.
7. Penyidik mengajukan Pemberitahuan penyitaan untuk mendapatkan penetapan status barang sitaan narkotika kepada Kejaksaan Negeri. Dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika, terdapat kekhususan yaitu penyidik harus meminta penetapan status barang bukti kepada kepala kejaksaan negeri. Penetapan status barang bukti tersebut berisikan tentang apa yang harus dilakukan penyidik terhadap barang bukti tindak pidana yang telah disita apakah akan dimusnahkan ataupun dimanfaatkan. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam praktiknya, barang bukti tindak pidana narkotika yang berupa narkotika dalam jumlah yang banyak lebih sering akan dimusnahkan. Hal ini dikarenakan sifat narkotika yang sangat berbahaya dan supaya barang bukti yang telah disita tidak disalahgunakan. Barang bukti yang bukan merupakan objek tindak pidana narkotika, akan disimpan di bagian tahanan dan barang bukti Polsek Singosari. Barang bukti yang dititipkan di bagian tahanan dan barang bukti ini merupakan barang yang mendukung dilakukannya tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana tersebut.

8. Meminta persetujuan Penyitaan dan pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah proses penyitaan barang bukti selesai dilakukan, dan berita acara penyitaan telah disetujui dan ditandatangani oleh pemilik atau penguasa barang. Penyidik diwajibkan segera meminta surat persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sangat penting maknanya dalam proses penyitaan barang bukti. Hal ini karena apabila penyitaan yang dilakukan tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah dan barang bukti yang disita tidak dapat diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu untuk mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyitaan barang bukti, penyidik reserse narkoba Polsek Singosari selalu sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada, oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri selalu memberikan persetujuan penyitaan.
9. Penyidik mengajukan permohonan bantuan pemeriksaaan secara Laboratorium Forensik guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, apakah barang bukti tersebut adalah Narkotika / Shabu – shabu, apakah barang butki tersebut terdapat kandungan Narkotika.
10. Membungkus dan menyegel barang bukti. Setelah barang bukti tindak pidana narkotika yang didapat ditimbang, maka penyidik diwajibkan untuk membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut tetap aman untuk dapat dijadikan bahan pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan.
11. Membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Setelah proses pembungkusan dan penyegelan barang berakhir, seperti proses lainnya penyidik juga diharuskan untuk membuat berita acara penyitaan yang isinya tentang barang bukti apa saja yang dibungkus dan atau disegel serta tata cara pembungkusan atau penyegelan tersebut dilakukan. Berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini kemudian ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan tersangka tindak pidana.
12. Yang kemudian barang bukti disimpan di rupbasan ( Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) atau di penyidik yang menangani perkara tersebut masing – masing.
13. Pada saat relas barang bukti dilimpahkan ke kejaksanaan termasuk barang bukti sisa dari Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim.

Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Polsek Singosari, pertama dimulai dari penyidikan apabila ada laporan, pengaduan, pengetahuan penyidik sendiri atau bisa diketahui tertangkap tangan oleh penyidik, kemudian penyidik melakukan upaya penangkapan tersangka, penahanan, pengeledahan badan dan rumah, selanjutnya melakukan penyitaan. *Kedua*, penyidik melakukan pemeriksaan di TKP, memeriksa tersangka dan pemeriksaan saksi dan ahli. *Ketiga*, tersangka ditahan di Satuan Tahanan dan Barang bukti sedangkan barang bukti yang disita oleh penyidik untuk keamanan dan pengelolaannya dikelola juga oleh Penyidik apabila berkas perkara belum lengkap maka Pengadilan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik maka penyidik wajib melengkapi berkas-berkas yang kurang. *Keempat*, setelah berkas perkara lengkap (P21) maka tersangka dititipkan di Rutan sementara barang bukti atau benda sitaan di eksekusi menurut putusan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Di dalam Proses penyelesaian Perkara Pidana penyidik memiliki suatu kewenangan tentang

Penyitaan pada bagian keempat pada pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP, Pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan:

*“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan ,penuntutan dan peradilan.”*

Barang bukti narkoba merupakan barang bukti yang mempunyai beberapa jenis dan/ataupun sifat. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba dibedakan menjadi;

- a. Narkotika golongan I : ganja, heroin, opium;
- b. Narkotika golongan II : petidin, benzetidin dan betametadol;
- c. Narkotika golongan III : kodein dan turunannya.

Penggolongan yang dilakukan pada UU narkotika sendiri dibuat guna untuk menentukan jenis dari narkotika tersebut. Dan selain untuk menentukan jenis dari narkotika. Bahwa tujuan dari penggolongan narkotika tersebut, juga untuk menentukan beratnya hukuman yang akan diberikan bagi pengedar narkotika.

Sehingga dari hal itu, agar untuk menindaklanjuti secara dalam tentang jenis barang bukti narkotika, maka penyidik narkoba di Kepolisian Sektor Singosari menggunakan cara penelitian di Polda Jawa Timur, guna untuk menentukan jenis barang bukti narkotika tersebut dan memberikan ketentuan pidana apa yang telah dia langgar sesuai dengan

### **Tindakan Penyidik Apabila Barang Bukti terjadi kerusakan atau kehilangan**

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dari awal barang bukti itu diterima oleh penyidik yang kemudian diserahkan kepada Unit Tahti yang nantinya barang bukti tersebut dilelang, dikembalikan atau dimusnahkan oleh Unit Tahti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya

Dalam penjelasan Pasal 45 KUHAP, penyidik narkoba mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti narkoba. Tanggung jawab tersebut diantara lain:

1. Penyidik narkoba akan mempergunakan barang bukti narkoba tersebut bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri sesuai dengan surat penetapan dari ketua Pengadilan negeri/kepala Kejaksaan Negeri;
2. Penyidik narkoba dapat mengamankan barang bukti narkoba, dikarenakan bahwa barang bukti narkoba termasuk barang bukti yang lekas rusak;
3. Penyidik narkoba menyingkirkan barang bukti narkoba yang telah dimusnahkan sebagian, guna kepentingan pembuktian.

Adapun resiko yang harus ditanggung penyidik apabila ada kerusakan atau hilangnya benda sitaan:

- a. “Barang bukti harus diperbaiki agar seperti semula meskipun dengan biaya pribadi.
- b. Barang bukti yang hilang sebisa mungkin diganti dengan barang yang sama atau serupa.
- c. Apabila hasil pemeriksaan sidang terbukti telah lalai dalam meminjamkan barang bukti meskipun karena alasan hukum tetap harus mengganti, selain itu dikenakan tindakan administratif dan tindakan fisik berupa penahanan dalam sel tahanan.”<sup>10</sup>

Anggota kepolisian yang terbukti telah menghilangkan ataupun melakukan tindakan tercela terhadap barang bukti akan diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut diantaranya sanksi pelanggaran disiplin, sanksi karena melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian, sanksi berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan sanksi pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP.

1. Sanksi hukuman disiplin
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik
3. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
4. Sanksi Pidana Menurut KUHP

## **PENUTUP**

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian pada tindak pidana narkoba di Polsek Singosari yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian dalam tindak pidana narkoba di Polsek Singosari. Penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba yang dapat dilakukan oleh penyidik Polsek Singosari dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam bentuk penyitaan, yaitu :

- (a) Penyitaan biasa,
- (b) Penyitaan dalam keadaan mendesak,
- (c) Penyitaan tertangkap tangan
- (d) Penyitaan surat atau tulisan lain.

Namun karena objek utama tindak pidana narkoba yaitu narkoba dapat dengan cepat dipindahkan, disembunyikan bahkan dimusnahkan oleh tersangka, dalam praktiknya penyidik Polsek Singosari lebih sering menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak. Penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan penyidik Polsek Singosari selama ini telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu ditandatanganinya berita acara penyitaan oleh orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita oleh penyidik. Selain itu, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga selalu mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.